



**PERAN POLITIK KYAI DI PEDESAAN (STUDI KASUS DI
KECAMATAN WANGON, KABUPATEN BANYUMAS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Tri Sundari

NIM. 3401401023

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sunarto, M.Si.
NIP. 131570082

Rodiyah, S.Pd M.Si.
NIP. 132258661

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M.Si.
NIP. 131764048

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi atau tugas akhir ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasar kode etik ilmiah.

Semarang, 2005

Tri Sundari
NIM. 3401401023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bermimpilah tentang apa yang kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan” (www. Mutiara hidup. com).

PERSEMBAHAN

- 1. Allah SWT yang telah memberi rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.*
- 2. Eyang kakung (Alm) dan eyang putri yang selalu mendukung setiap langkahku.*
- 3. Ayah dan bundaku tercinta yang selalu memberi do'a dan motivasi.*
- 4. Saudaraku Mba Retno, Mas Dwi, dan wiji tersayang.*
- 5. Puji, Leli, Ajeng, dan Desi bersahabat dengan kalian adalah kenangan terindah dalam hidupku yang tidak akan pernah aku lupakan.*
- 6. Teman-teman angkatan 2001*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN POLITIK KYAI DI PEDESAAN STUDI KASUS DI KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I di Universitas Negeri Semarang guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini, adalah atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang bahagia ini, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. DR. A.T. Soegito, SH., MM, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sunardi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si, Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sunarto, M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Rodiyah, Spd, M.Si, Dosen pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan semangat dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Suwardi Bintoro, SH, Kepala Kecamatan Wangon yang telah memberikan ijin penelitian dalam pembuatan skripsi ini.

7. Semua responden dan informan yang telah bersedia dengan tulus dan jujur untuk memberikan informasi tentang Peran Politik Kyai di Pedesaan.
8. Eyang kakung (alm), Eyang putri, Ayah, Bunda dan Saudaraku serta calon pendamping hidupku yang telah memberikan do'a dan motivasi.
9. Teman-teman angkatan 2001 yang selalu berbagi dalam suka dan duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amin.

Semarang,

2005

Penulis

SARI

Tri Sundari. 2005. *Peran Politik Kyai di Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 97 halaman, 9 tabel, 5 lampiran.

Kata kunci: Peran Politik, Kyai, Pedesaan

Peran tokoh agama dalam sebuah partai seringkali menentukan pemilihan konstituen dalam pemilu. Hal ini karena tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang dan dipuja karena ide serta kharisma yang dimiliki. Maka tidak dapat dipungkiri apabila banyak partai politik yang berebutan menawarkan seorang tokoh dalam kepengurusan partai. Bahkan diangkat dalam kepengurusan partai dan diminta untuk merestui partai tersebut dengan harapan memperoleh suara dari para konstituen. Adanya keterlibatan kyai dalam politik merupakan bagian dari fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, supaya diperoleh jawaban yang akurat.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa sajakah bentuk atau variasi peran politik kyai di pedesaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas? (2) Bagaimanakah interaksi antara kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas? (3) Sejauhmana peran politik kyai mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas?. Penelitian ini bertujuan: (!) Untuk mengetahui bentuk atau variasi peran politik kyai di pedesaan di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (2) Untuk mengetahui interaksi antara kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (3) Untuk mengetahui peran politik kyai dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini di fokuskan pada (1) Bentuk atau variasi peran politik kyai di pedesaan di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, (2) Interaksi kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?, (3) Sejauhmana peran politik kyai mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Sumber data di peroleh dari (1) Responden dan informan yaitu warga masyarakat Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas (2) Dokumen berupa arsip dan data. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data divalidasi dengan tehnik triangulasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan model analisis interaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kyai dalam politik mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu 2004 di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Hal ini didukung dengan adanya interaksi kyai dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintah. Bentuk atau variasi peran politik kyai di pedesaan antara lain (1) Mengikuti kampanye pada tahun 2004, (2) Ceramah-ceramah keagamaan, (3) Memberikan anjuran pada masyarakat untuk mengikuti kegiatan kampanye, (4) Rapat partai.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengikuti partai pilihan kyai biasanya masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan kyai dan sering mengikuti berbagai kegiatan bersama kyai. Dan masyarakat yang tidak mengikuti partai kyai adalah masyarakat yang mengaku dirinya Islam tetapi pengetahuan agamanya kurang dan biasanya tidak terlalu akrab dengan kyai.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Para kyai hendaknya tidak terlalu larut dalam kegiatan politik praktis, lebih meningkatkan peranannya dalam membimbing masyarakat, serta membantu pemerintah dalam menyukseskan program-programnya. Dan bagi masyarakat, dalam memilih partai seharusnya memperhatikan visi dan misi partai pilihannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
SARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Perumusan Masalah.....	5
1.4 Batasan Operasional.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Kegunaan Penelitian.....	7
1.7 Sistematika.....	7
BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN	
2.1 Peran Politik.....	9
2.2 Kyai.....	14
2.3 Pedesaan.....	21

2.4	Preferensi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilu	23
2.5	Kerangka Teoritik	25
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian.....	29
3.2	Fokus Penelitian	29
3.3	Sumber Data.....	30
3.4	Alat dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Keabsahan Data.....	35
BAB IV METODE PENELITIAN		
4.1	Hasil Penelitian	39
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sumber Data Penelitian.....	32
Tabel 2. Gambaran Informan dilihat dari Tingkat Pendidikan	44
Tabel 3. Gambaran Informan dilihat dari Mata Pencaharian	45
Tabel 4. Bentuk Peran Politik Kyai.....	50
Tabel 5. Interaksi Kyai dengan Tokoh-tokoh Politik dan Pemerintah.....	57
Tabel 6. Hasil Perolehan Suara Pemilu 2004 Kecamatan Wangon	61
Tabel 7. Hasil Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	62
Tabel 8. Prosentase Hasil Perolehan Suara PKB	62
Tabel 9. Jumlah Perolehan Suara Pemilihan Presiden dan Wapres	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	27
Gambar 2. Analisis Data Kualitatif.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Nama Responden dan Informan	82
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	83
Lampiran 3. Logo Partai Politik Peserta Pemilu 2004.....	88
Lampiran 4. Peta Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	89
Lampiran 5 Permohonan Ijin Penelitian	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tidak dapat di pungkiri bahwa peran tokoh dalam sebuah partai sangat menentukan pemilihan konstituen dalam pemilu apalagi tokoh tersebut menjadi panutan banyak orang atau minimal di puja karena ide-idenya atau hanya bermodal kharisma yang dimiliki. Maka tak hayal apabila banyak partai politik yang berebutan menawarkan seorang tokoh dalam kepengurusan partai. Bahkan di angkat dalam kepengurusan partai dan diminta untuk merestui partai tersebut dengan harapan memperoleh suara dari para konstituen yang memiliki hubungan emosional dengan sang tokoh. Bentuk kongkrit dari ketokohnya adalah ikut dalam mendeklarasikan sekaligus duduk dalam kepengurusan elite partainya.

Dalam suatu masyarakat peran elite agama dan elite penguasa cukup mempengaruhi kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Kelompok tersebut antara lain aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam bidang politik adalah kiai.

Kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi yang strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi mereka itu terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik dan kaya dalam masyarakat. Sebagai elite terdidik kiai memberikan pengetahuan Islam kepada para penduduk desa. Dan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional adalah sarana penting untuk

melakukan transfer pengetahuan terhadap masyarakat desa tersebut. Dengan kekayaan yang dimilikinya kiai menjadi patron kepada siapa banyak penduduk desa bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama kalau pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan para santri atau siswanya (Fox dan Dirjosanjoto,1989).

Sebagai pemimpin Islam informal, kiai adalah orang yang diyakini penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena kiai adalah orang suci yang dianugrahi berkah, karena tipe otoritas ini berada di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari (Weber,1973:53). Sehingga kiai dipandang mempunyai kelebihan yang luar biasa yang membuat kepemimpinannya diakui secara umum. Di samping kelebihan personalnya otoritas kiai dan hubungan akrabnya dengan anggota masyarakat telah di bentuk oleh kepedulian dan otoritasnya pada kepentingan-kepentingan umat Islam.

Posisi kiai telah memainkan peran perantara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman apa yang terjadi di tingkat nasional (Geertz,1959). Para penduduk desa yang biasa menyebut diri mereka orang awam, sadar bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara penduduk desa tersebut dengan kiai menempatkan kiai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan dalam konteks agama dan mengklarifikasi berbagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol para kiai ini lebih tampak ketika partai politik secara intens memasuki

masyarakat Jawa. Ini terjadi karena Kiai sendiri adalah bagian dari elite politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai posisi kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam berbagai macam tantangan yang nyata dari kelompok-kelompok lain.

Menurut Snouck Horgonje, penasehat pemerintah Belanda menyampaikan sarannya kepada pemerintah Belanda (*Dutch Islamic Policy*) dengan tujuan mematahkan perlawanan umat Islam. Antara lain Snouck Horgonje menyarankan bahwa:

“yang harus ditakuti pemerintah Belanda bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Biasanya dipimpin *Small minority* yang fanatik yaitu ulama yang membaktikan hidupnya kepada cita-cita Islamisme. Golongan ini lebih berbahaya kalau pengaruhnya meluas kepada petani di desa-desa. Karena itu pemerintah disarankan untuk bersikap netral terhadap Islam sebagai agama dan bertindak tegas terhadap Islam sebagai doktrin politik. Pemerintah Belanda harus menyempitkan ruang gerak dan pengaruh Islam. Hal ini dapat di capai melalui kerjasama dalam hal kebudayaan Indonesia-Belanda. Ini dapat di mulai dengan memeralat golongan priyayi yang selalu berdekatan dengan pemerintah, yaitu dengan mendidik golongan priyayi dengan pendidikan Barat. Dalam menghadapi perang Aceh, Snouck Horgonje menasehatkan supaya dijalankan operasi militer ke daerah pedalaman dan menindak tegas para ulama yang ada di kampung-kampung dan tidak di beri kesempatan menyusun kekuatannya dengan membentuk santrinya sebagai pasukan sukarela”.

Alam pikiran Snouck Horgonje ini menjadi dasar strategi melumpuhkan dan memarginalkan kekuatan Islam yang dilakukan oleh kekuatan politik anti Islam. Dari fenomena di atas, telah jelas bahwa dalam sepanjang sejarah ulama memegang peranan penting dalam politik.

Peran Kiai secara ideal adalah yang bersih dari politik praktis dan mengembalikan posisi sebagai organisasi sosial keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, serta

mengembalikan ulama sebagai pemimpin yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya posisi kiai dimanfaatkan oleh elite politik.

Dengan tetap eksisnya peran kiai di pedesaan Kabupaten Banyumas, menimbulkan motivasi bagi penulis untuk mengadakan penelitian tentang Peran Politik Kiai di Pedesaan. Untuk itulah dalam penelitian ini penulis memilih judul “Peran Politik Kiai di Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas).

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Kiai memiliki peran politik yang cukup besar dalam masyarakat. Hal ini karena sebagai pemegang otoritas keagamaan, kiai di dudukan dalam posisi yang terhormat sehingga mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi atau tanggapan emosional para pengikutnya. Meskipun menjadi tokoh karismatik hanya sedikit yang mengikuti langkah politik kiai. Perbedaan antara kiai dan pengikutnya dalam hubungannya dengan perilaku politik menjadi fenomena biasa, khususnya setelah berubahnya partai politik Islam. Namun demikian peran kiai secara umum masih tetap penting karena kiai berada pada garis depan dalam membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam.

Hubungan antara kiai dengan tokoh politik dan pemerintah berhubungan dengan upaya mengakumulasi kekuasaan. Beberapa penguasa bahkan secara intensif memobilisasi dukungan para tokoh agama, sejumlah kiai, ulama, pemimpin ponpes, maupun pemimpin organisasi masa keagamaan untuk sebuah pemilihan. Hal ini disebabkan karena kiai dianggap mempunyai massa yang cukup banyak.

Peran politik kiai mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini karena alasan-alasan keagamaan. Kiai dianggap sebagai figure yang dijadikan penuntun bagi pengikutnya.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, tentang tetap eksisnya peran kiai saat ini di tengah perkembangan masyarakat secara umum maka timbul suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk atau variasi peran politik kiai di pedesaan?
2. Bagaimanakah interaksi antara kiai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik?
3. Sejauh mana peran kiai mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilihan umum?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk atau variasi peran politik kiai di pedesaan khususnya di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui interaksi antara kiai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik.
3. Untuk mengetahui peran politik kiai dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis

Bagi dunia akademis hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

Memberi masukan bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah setempat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan pembangunan.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Wangon khususnya para kiai untuk dapat lebih meningkatkan eksistensinya dalam kehidupan baik di bidang agama, pendidikan, maupun pembangunan masyarakat desa.

1.6 Sistematika

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terbagi dalam berbagai uraian sub-sub bab. Sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lampiran. Bagian isi skripsi terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II: Penelaahan Kepustakaan dan/atau Kerangka Teoritik

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang di gunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya yaitu pengertian peran politik, pengertian kiai, pengertian pedesaan, pengertian peran politik kiai di pedesaan.

Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan tehnik pengumpulan data, Keabsahan data, model analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V: Penutup

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Peran Politik

Teori-teori politik tentang elite memberikan tekanan pada kelompok kecil yang mempunyai pengaruh besar atau kekuasaan politik besar dalam suatu sistem politik. Mosca dalam karya klasiknya “ *The Rulling Class*” mengemukakan bahwa:

Dalam setiap masyarakat, terdapat dua kelas penduduk satu kelas menguasai dan satu kelas dikuasai. Kelas pertama jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua jumlahnya selalu lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama”.

Menurut Fred R Van Der Meliden, elite politik di negara-negara berkembang di golongkan menjadi tiga yaitu:

1. Elite Tradisional, yaitu mereka yang berhasil menjadi pemimpin berdasar adat istiadat, pewaris atau budaya lama, yang termasuk elite tradisional antara lain:
 - a. Pemimpin Agama

Dalam setiap agama baik Kristen, Budha, maupun Islam memiliki pemimpin agama yang terlibat dalam politik.

- 1) Agama Budha memiliki tata cara yang melarang melibatkan diri secara terbuka dalam politik, tetapi anggota sangha (kerahiban) di Burma dan Srilanka khususnya cenderung melibatkan diri dalam politik duniawi. Sami Budha di Srilanka pernah terlibat dalam

pembunuhan seorang perdana menteri. Di Burma pangyi (sami) pernah aktif dalam pergerakan nasional sebelum perang dan mengambil bagian dalam demonstrasi mengecam perdebatan tahun 1961 yang berhubungan dengan pengukuhan negara Budha di Burma. Walaupun secara resmi pemimpin agama kedua negara tersebut telah menyesali akan kegiatan demikian, tetapi banyak kalangan sami khususnya yang lebih muda mengakui bahwa tindakan politik itu penting untuk mencapai kepentingan agama.

- 2) Dalam Islam baik alim ulama, golongan haji dan organisasi Islam sejak dulu telah bergerak aktif dalam kehidupan politik. Para pemimpin agama Islam sejak dulu telah berpengaruh di Iran, Indonesia, Pakistan (terutama sebelum presiden Ayuh Khan mengambil kuasa).
- 3) Keadaan yang sama juga berlaku di kalangan elite Kristen, pemerintahan tiga serangkai yang kuat dari segi tanah, gereja dan militer Amerika Latin di masa lampau pernah memerintah negara-negara di Benua Amerika. Ini menunjukkan bahwa politik yang bersifat sektarian sudah lama berkembang, kecuali di negara tertentu seperti Mexiko dan negara komunis yang membatasi jumlah dan aktifitas alim ulama, sami, ahli taksir agama, pendeta.

b. Bangsawan

c. Golongan Bangsawan yang memiliki tanah.

2. Elite Baru, yaitu terdiri dari pejuang nasional yang relatif muda yang memiliki hubungan dengan kota dan kebudayaan Barat, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan pembaharuan sosial dan ekonomi. Elite baru yang termasuk berhasil yaitu Toure, Castro, Nasser, Nkrumah, Soekarno.

3. Elite Ekonomi Asli

Menurut Parcell dan Skinner, pengaruh elite ekonomi asing berpengaruh terhadap persatuan dan kemantapan negara-negara baru adalah penting terutama negara baru merdeka.

Menurut Huntington Samuel dan Nelson Joan, partisipasi politik dapat berwujud berbagai bentuk. Sehingga studi-studi tentang partisipasi dengan menggunakan skema klasifikasipun berbeda-beda. Namun kebanyakan riset membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi setiap calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying* yaitu Upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sebagian besar orang.
3. Kegiatan Organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4. Mencari Koneksi (*Conecting*) merupakan tindakan perorangan yang di tujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) yaitu upaya mempengaruhi pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang dan harta benda.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kebebasan warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yang demokratis adalah :

- a. Pasal 28 D(3) ”Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”
- b. Pasal 28 E(2) ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”.
- c. Pasal 28 E(3) ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Dari pasal-pasal tentang hak warga negara diatas menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam suatu pemerintahan yang demokratis asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai Ketuhanan. Karena Indonesia adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 29 ayat 1). Bunyi pasal di atas memberi penjelasan tentang peran seseorang sebagai warga negara Indonesia.

2.2 Kiai

Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah kiai berbeda dengan istilah ulama. Horikoshi (1976) dan Mansurnoor (1990) membedakan kiai dan ulama dalam peran dan pengaruhnya dalam masyarakat. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang di anggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat (Gilsen,1973).. Dengan kata lain fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam (Horikoshi,1976:232). Istilah ulama secara luas di gunakan di dunia Islam. Di Indonesia berbagai istilah lokal di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan, dan istilah yang paling di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai.

Di Jombang, variasi penggunaan seperti ini tidak muncul setegas di Madura (Mansurnoor:1990). Semua ulama dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di sebut kiai. Dengan kata lain istilah kiai di Jombang tidak mesti merujuk kepada mereka yang menjalankan pesantren, tetapi juga ditujukan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan keislaman yang lebih tinggi di bandingkan warga lain. Hirarki keulamaan di Jombang berbeda misalnya dengan di Madura. Ia tidak terikat dengan struktur

formal apapun tapi lebih terletak pada pengakuan sosial sehingga agak sulit mengenali tingkat kekiaian seseorang. Hanya yang memiliki pesantren yang dapat di kenal dengan mudah, mereka di anggap kiai yang lebih tinggi derajatnya (Endang Turmudi:2004:31).

Menurut Endang Turmudi kiai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kiai dapat di golongankan lebih dalam satu kategori. Dari empat kategori tersebut kiai dapat di bagi menjadi dua kategori lebih besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

1. Kiai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas dari pada kiai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri atas:
 - a. Kiai Pesantren, kiai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai. Ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kiai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kiai adalah orang yang patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi kiai maka mereka juga membangun jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kiai pesantren di

mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

- b. Kiai Tarekat, kiai ini memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kiai tarekat adalah sebuah lembaga formal, para pengikut kiai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut kiai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut tarekat.
2. Kiai yang menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kiai ini terdiri atas kiai panggung dan kiai politik.
 - a. Kiai Panggung, kiai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat terjadi karena hanya kiai panggung yang populer saja yang bisa di undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan kiai panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam di daerahnya saja.
 - b. Kiai Politik, kiai ini lebih merupakan kategori campuran. Ia merujuk kepada kiai yang mempunyai concern untuk mengembangkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di kelola oleh kategori kiai ini yang tidak mempunyai pengikut seperti kiai lain.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya kiai dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kiai Tradisional, yaitu kiai yang mengambil pendidikan Islam di pesantren tradisional. Kiai tradisional biasanya memiliki pengetahuan Islam lebih banyak dari kiai modern.
- b. Kiai Modern, yaitu kiai yang pengetahuannya di peroleh dari lembaga pendidikan Islam modern, biasanya memiliki metodologi pengajaran yang lebih baik dari pada kiai tradisional. Kepemimpinan seorang kiai modern berbeda dengan kiai tradisional. Ikatan emosional antara kiai modern dengan santrinya kurang begitu kuat. Namun demikian beberapa kiai modern masih sanggup menarik ikatan emosional para santrinya sejauh ia di dukung oleh faktor-faktor lain, seperti garis keturunan kiai atau lembaga-lembaga tertentu yang diikutinya

Pada masa wali songo ada beberapa cara berdakwah para ulama yaitu:

1. Ulama yang berdakwah sesuai ajaran dan petunjuk Nabi SAW, yaitu tidak di campur dengan berbagai budaya atau adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam. Ulama ini di sebut kelompok putihan yang di dukung oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang.
2. Ulama yang berdakwah dengan menggunakan sarana budaya dan adat istiadat, cara ini di gunakan oleh Sunan Kalijaga. Kelompok ini terkenal dengan sebutan kelompok abangan.

Masyarakat Jawa di kenal secara luas mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara pribadi-pribadi dalam status sosial mereka , dan ini telah menjadi norma yang mengatur hubungan sosial di kalangan orang Jawa (Guinness:1986). Status sosial secara luas dapat di tentukan oleh usia,

kekayaan, dan pekerjaan. Oleh karena itu orang yang lebih tua di sebuah desa, akan mendapatkan penghormatan dari orang yang lebih muda, orang kaya akan memperoleh penghormatan dari orang miskin, orang yang berpendidikan tinggi akan dihormati oleh orang Jawa yang kurang terdidik. Sejak usia dini orang Jawa telah dikenalkan dengan norma-norma tersebut. Sistem norma tersebut bekerja secara efisien, khususnya di daerah-daerah pedesaan dimana kebanyakan orang saling mengenal, sehingga lokasi sosial setiap pribadi orang Jawa dengan mudah di kenali.

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka para ulama khususnya para Kiai di desa-desa Jawa menerima penghormatan yang tinggi dalam masyarakat. Dibandingkan dengan elite lokal yang lain seperti para petani kaya, Kiai yang memimpin pesantren punya posisi yang lebih terhormat. Hal ini telah menjadikan Kiai sebagai pemimpin dalam masyarakat dan kepemimpinannya tidak hanya pada wilayah agama tetapi meluas pada wilayah politik. Keberhasilan Kiai dalam peran-peran kepemimpinan menjadikan Kiai semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakkan aksi sosial. Oleh karena itu, Kiai telah lama menjadi elite yang kuat. Ada dua faktor yang mendukung posisi kuat seorang Kiai, yaitu:

1. Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam menyebabkan Kiai selalu punya pengikut, baik pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.

2. Kiai biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak sedikit kiai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan Islam di tunjukan oleh ukuran gedung pesantrennya, namun secara umum kiai berasal dari keluarga kaya. Dua faktor ini membuat kiai di pandang sebagai tokoh elite di desa.

Untuk memperkuat hubungan dengan para santrinya , seorang kiai tidak jarang mengijinkan sebagian mereka yang berasal dari keluarga miskin untuk bekerja di ladangnya (Fox dan Dirjosanjoto:1989). Umum di ketahui bahwa seorang calon kiai sering kali memiliki apa yang di maksud ilmu laduni yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa belajar. Pengetahuan seperti ini yang mungkin mendahului kekiaian seseorang atau muncul setelah ia menjadi kiai sehingga memberi legitimasi bagi kepemimpinan seorang kiai.

Hubungan antara kiai dan masyarakatnya diikat oleh hubungan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang mempengaruhi aksi-aksi kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi, karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah-masalah spirtual tetapi mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional (Horikoshi:1976). Keberhasilan dalam menunjukkan peran penting tersebut "...mengarah hampir tidak terelakkan pada penempatannya tidak hanya sebagai seorang mediator hukum dan doktrin Islam tetapi juga sebagai kekuatan suci itu sendiri" (Geertz,1962:238).

Di bawah kondisi seperti ini, kiai di Jawa mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat dan memainkan peran krusial dalam menggerakkan aksi-aksi sosial bahkan politik. Posisi dan peran pentingnya juga tidak hanya terbatas dalam masyarakat bawah saja, seperti dilihat dalam NU, khususnya ketika ia merupakan organisasi politik yang mempunyai berbagai macam anggota, termasuk para intelektual dan para politisi, posisi sentral kiai dibuktikan oleh tingginya wibawa dan pengaruh yang dimilikinya dibandingkan dengan para politisi profesional (Samson,1978:201). Persetujuan kiai dapat menjamin dukungan masyarakat pada sebuah partai politik karena kiai pada umumnya "...di yakini sejak lama, menggunakan kekuasaan secara sah karena mereka melakukan demi Tuhan" (Samson,1978: 201).

Hubungan antara kiai dan masyarakat mirip dengan hubungan antar ulama atau orang suci dalam masyarakat dunia Islam lain (Bruinessen,1992:246-249). Lahirnya gerakan sufi di Afrika Utara hampir selalu dimulai dengan penerimaan masyarakat atas kehadiran ulama (Gellner, 1969). Di daerah-daerah tertentu, seperti Madura penerimaan masyarakat di dasarkan pada geneologi, yang berarti bahwa seorang kiai juga harus berasal dari keluarga kiai (Mansurnoor,1991).

Menurut Weber ada tiga legitimasi atau landasan kekuasaan dari seseorang yaitu:

1. Dimensi Tradisional, yaitu kewibawaan hari kemarin yang kekal yaitu adat istiadat yang di sucikan melalui pengakuan kuno yang tidak bisa digambarkan dan orientasi kebiasaan untuk melakukan penyesuaian diri.
2. Dimensi Kharismatik yaitu kewibawaan dengan keanggunan pribadi yang luar biasa dan ketaatan yang mutlak serta ketaatan terhadap wahyu atau kualitas lainnya dari kepemimpinan individual.
3. Dimensi Kebajikan Legalitas oleh kebajikan kepercayaan akan validitas undang-undang dan kompetensi fungsional yang di landasi oleh peraturan-peraturan yang di buat secara rasional.

2.3 Pedesaan

Desa adalah daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu marga atau negeri yang di gabungkan hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (UU No.22 Tahun 1948 ayat 1). Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki potensi fisik dan nonfisik yang satu sama lain saling mempengaruhi dan merupakan sebuah sistem. Potensi nonfisik desa meliputi:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasar gotong royong dan merupakan dasar kekuatan untuk membangun.

2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi sosial desa yang memberi bantuan sosial dan bimbingan positif pada masyarakat.
3. Aparatur atau pamong desa yang bertugas menjaga kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Kehidupan masyarakat desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam dengan warga masyarakat pedesaan lainnya.
2. Sistem hidup yang bersifat tradisional , kekeluargaan, dan gotong royong .
3. Sebagian besar masyarakat hidup dengan bertani.
4. Rasa persatuan warga yang erat.
5. Hubungan penguasa dan rakyat berlangsung secara tidak resmi.
6. Jumlah penduduk sedikit.
7. Pendidikan masyarakat yang masih rendah.
8. Mobilitas rendah.
9. Status sosial rendah.

Dari ciri-ciri diatas, maka hubungan antara masyarakat dengan aparat pemerintah desa berjalan lebih akrab. Menurut Bintarto pembinaan masyarakat desa dapat menggunakan beberapa cara yaitu:

1. Sarasehan langsung antara pemerintah dan masyarakat desa.
2. Kursus-kursus yang ditujukan pada kepala keluarga atau tokoh masyarakat.
3. Penataran di tingkat kecamatan atau kelurahan.
4. Melalui guru atau murid di sekolah.

2.4 Preferensi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih presiden dan wakil presiden. Wakil-wakil yang duduk di lembaga-lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh preferensi atau pilihan politik masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu berbagai cara sering kali digunakan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu adalah faktor keluarga, tingkat pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok senggang, dan media massa.

Menurut Almond dan Verba dalam masyarakat terdapat budaya politik yang pandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat, tanpa memiliki hubungan baik dengan sistem maupun dengan struktur politik. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota sistem politik. Almond dan Verba membagi Budaya politik menjadi tiga bagian yaitu:

2.4.1 Budaya Politik Parokial.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki penkhususan tugas. Tetapi

peran yang satu di lakukan dengan peran yang lain baik di bidang sosial, ekonomi maupun keagamaan.

2.4.2 Budaya Politik Subyek

Dalam budaya politik Subyek, masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi di tentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi, menerima, setia, loyal pada pimpinannya.

2.4.3 Budaya Politik Partisipan

Masyarakat dalam Budaya Politik Partisipan memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan untuk sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif.

Seorang atau orang lain di anggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, jika memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Dari teori budaya politik oleh Almond dan Vebra di atas maka telah jelas bahwa budaya politik dalam masyarakat di pengaruhi oleh kondisi latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat desa budaya politiknya adalah budaya politik parokial. Budaya politik seperti ini akan mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu.

2.5 Kerangka Teoritik

Kehidupan politik suatu negara merupakan sebuah struktur politik. Struktur politik berarti pelembagaan hubungan antara komponen-komponen

yang membentuk sistem politik. Dimana struktur politik antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Artinya bahwa berfungsinya satu bagian struktur tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan cara berfungsinya keseluruhan bagian yang lain. Komponen struktur politik di bedakan menjadi dua komponen pokok yaitu Suprastruktur politik dan Infrastruktur politik.

Suprastruktur politik berkenaan dengan suasana kehidupan politik pemerintah yang merupakan kompleks hal yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang lembaga negara tersebut, serta hubungan kerja antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Dan Infrastruktur politik berkenaan dengan pengelompokan anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya di sebut kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Dalam sistem politik Indonesia, komponen organisasi Infrastruktur ini meliputi:

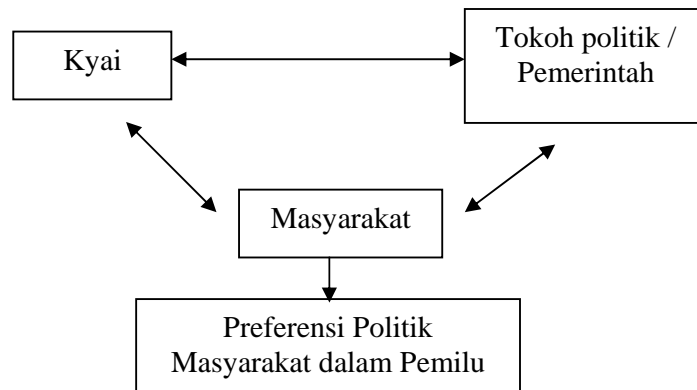
1. Yang secara formal diakui oleh pemerintah dan ikut menjadi kontestan pemilu yaitu partai politik.
2. Yang secara formal tidak ikut serta menjadi kontestan dalam pemilu, akan tetapi sedikit banyak mempengaruhi hasil pemilu, seperti organisasi agama dan organisasi-organisasi yang mandiri.
3. Tokoh Masyarakat yang memiliki peran penting dalam dukungan massa.

Di pedesaan peran elite agama dan elite penguasa cukup menonjol dalam perubahan sosial. Argumentasi posisi strategis elite agama dapat di cermati di bidang sosial keagamaan, pendidikan, pengembangan masyarakat dan bidang politik. Tradisi pesantren dalam perubahan sosial politik dapat

dilihat dari dua aspek , yaitu tradisi pesantren sebagai basis cultural dan tradisi pesantren sebagai mediator antara kepentingan partai politik dengan para pendukungnya. Tradisi yang kedua ini menempatkan posisi politik kiai menjadi signifikan untuk di perebutkan partai politik dalam rangka memperoleh dukungan suara.

Tradisi pesantren merupakan bentuk sistem sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan yang di bangun kiai. Sistem kekerabatan yang di kembangkan kiai di bangun di atas landasan yang kuat melalui hubungan kekerabatan geneologi sosial kiai, jaringan aliansi perkawinan, geneologi intelektual, dan aspek hubungan antara guru murid atau kiai dengan santri yang tidak hanya di batasi pada lingkungan pesantren dan persoalan keagamaan saja tetapi bisa keluar dari lingkungan pesantren.

Di mata pemerintah, peranan pondok pesantren telah berhasil menggali potensi desanya dengan modal materi semurah-murahnya, bisa memberi pendidikan bagi rakyat, perbaikan lingkungan, menjalin kegotong royongan maupun pembinaan spiritual. Gerakan seperti ini membuat hubungan antara kiai dengan masyarakat dan pemerintah lebih dekat dan intim.



Gambar 2. Kerangka Teoritik

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai peran politik kiai di pedesaan. Seperti keterlibatan kiai dalam politik berupa ikut ambil bagian menjadi penggerak dalam suatu partai politik, interaksi antara kiai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik serta sejauhmana peran politik kiai dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian di lakukan. Mengacu pada lokasi ini yaitu wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah tempat dimana kiai bertempat tinggal dan melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Secara geografis letak Kabupaten Banyumas sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Kehidupan masyarakatnya secara umum masih masih bersifat sederhana dan mata pencahariannya bercocok tanam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak di mulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong,2000:62). Jadi fokus dari penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah iti sendiri.

Penelitian yang akan di laksanakan di fokuskan pada peran politik kiai di pedesaan. Seperti keterlibatan kiai dalam politik berupa ikut ambil bagian menjadi penggerak dalam suatu partai politik, interksi antara kiai dengan

pemerintah dan tokoh-tokoh politik setempat, serta sejauhmana peran kiai dalam politik mempengaruhi preferensi politik masyarakat Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas dalam pemilihan umum.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data utama dan sumber data tambahan. Sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan berupa dokumen (Loefand dan Moeloeng,2000).

Sumber data penelitian menyatakan bersal darimana data penelitian dapat diperoleh. Yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Responden

Responden adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kiai di kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas yang ikut aktif dalam partai politik di daerahnya.

3.3.2 Informan

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,2000:90). Informan yang di maksud disini adalah aparat pemerintah, tokoh-tokoh politik dan masyarakat desa di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

3.3.3 Dokumen

Dokumen disini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, buletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 2000:161). Hal itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang dilakukan oleh para peneliti lain.

Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh para tokoh politik dan data hasil pemilu 2004 Kecamatan Wangon yang berupa data tertulis dan foto tentang aktifitas kiai bersama tokoh-tokoh politik.

3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula. Ciri utama *interview* adalah kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*) (Maman Rachman, 1999:83). Dalam hal ini yang di wawancarai adalah:

1. Kiai yang ada di Kecamatan Wangon.
2. Tokoh-tokoh politik dan pemerintah daerah setempat.
3. Masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Wangon.

Bentuk wawancara yang di gunakan adalah “*semi structured*”. Dalam hal ini mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu di perdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang di peroleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Suharsimi Arikunto,1998).

3.4.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang di lakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observed berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung (Maman Rachman,1999:77).

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000:184) ciri-ciri pokok dalam observasi adalah:

1. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari pelaku manusia yang nyata.
2. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.
3. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan.

Tujuan observasi sendiri oleh Guba dan Lincoln dalam bukunya Moleong (2000:130) adalah:

1. Mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.
2. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
3. Mengadakan Eksplorasi (penjelajahan).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Pengamatan di lakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah aktifitas kiai untuk partai politiknya, serta interaksi antara kiai dengan pemerintah, tokoh-tokoh politik, dan masyarakat Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Maman Rachman, 1999:96).

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas baik data mengenai penduduk, sosial, budaya, maupun data kondisi daerah. Data

yang didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang terdapat dalam lapangan saat wawancara dan observasi.

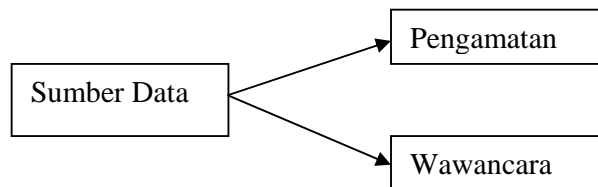
3.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dikontrol dengan metode triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang di gunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif (Patton,1987:331). Hal ini dapat di capai dengan membandingkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Menbandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah dan berpendidikan tinggi, orang pemerintahan dan orang berada.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Proses atau tehnik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.



Sumber data berasal dari pedoman wawancara, dibandingkan antara pengamatan di lapangan seperti aktifitas kiai dan hasil wawancara dengan kiai itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap.

2. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa yang di katakan secara pribadi.

Dalam teknik ini membandingkan antara responden A dan responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama, tujuannya adalah agar di dapatkan hasil penelitian yang di harapkan sesuai dengan fokus penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong,2002:103).

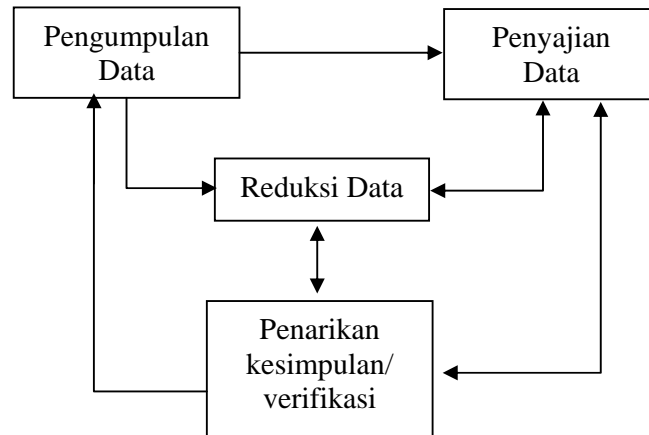
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103).

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Menurut Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi Data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu di perlukan.
3. Penyajian Data
Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data.
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang di peroleh. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pula, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

Tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Sumber: Milles dan Huberman dalam Rachman (1999:120)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang di kumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data, selain itu pengumpulan data juga di gunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi.

3.5 Kerangka Berpikir

Kehidupan politik suatu negara merupakan sebuah struktur politik. Struktur politik berarti pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Dimana struktur politik antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Artinya bahwa berfungsinya satu bagian struktur tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan cara berfungsinya keseluruhan bagian yang lain. Komponen struktur politik di bedakan menjadi dua komponen pokok yaitu Suprastruktur politik dan Infrastruktur politik.

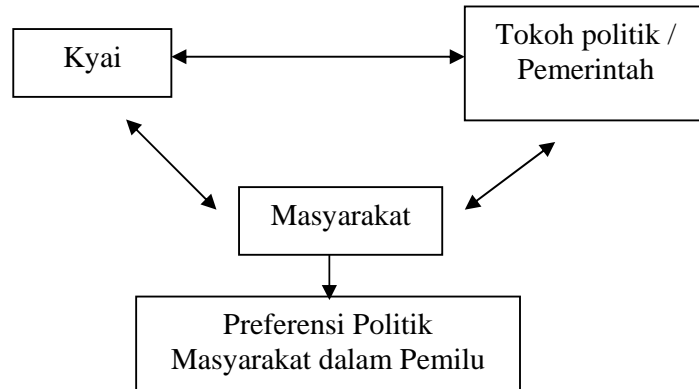
Suprastruktur politik berkenaan dengan suasana kehidupan politik pemerintah yang merupakan kompleks hal yang bersangkutan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi dan wewenang lembaga negara tersebut, serta hubungan kerja antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Dan Infrastruktur politik berkenaan dengan pengelompokan anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya di sebut kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Dalam sistem politik Indonesia, komponen organisasi Infrastruktur ini meliputi:

1. Yang secara formal diakui oleh pemerintah dan ikut menjadi kontestan pemilu yaitu partai politik.
2. Yang secara formal tidak ikut serta menjadi kontestan dalam pemilu, akan tetapi sedikit banyak mempengaruhi hasil pemilu, seperti organisasi agama dan organisasi-organisasi yang mandiri.
3. Tokoh Masyarakat yang memiliki peran penting dalam dukungan massa.

Di pedesaan peran elite agama dan elite penguasa cukup menonjol dalam perubahan sosial. Argumentasi posisi strategis elite agama dapat di cermati di bidang sosial keagamaan, pendidikan, pengembangan masyarakat dan bidang politik. Tradisi pesantren dalam perubahan sosial politik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu tradisi pesantren sebagai basis cultural dan tradisi pesantren sebagai mediator antara kepentingan partai politik dengan para pendukungnya. Tradisi yang kedua ini menempatkan posisi politik kiai menjadi signifikan untuk diperbutkan partai politik dalam rangka memperoleh dukungan suara.

Tradisi pesantren merupakan bentuk sistem sosial yang tumbuh di lingkungan pesantren melalui sistem kekerabatan yang dibangun kiai. Sistem kekerabatan yang dikembangkan kiai dibangun di atas landasan yang kuat melalui hubungan kekerabatan geneologi sosial kiai, jaringan aliansi perkawinan, geneologi intelektual, dan aspek hubungan antara guru murid atau kiai dengan santri yang tidak hanya dibatasi pada lingkungan pesantren dan persoalan keagamaan saja tetapi bisa keluar dari lingkungan pesantren.

Di mata pemerintah, peranan pondok pesantren telah berhasil menggali potensi desanya dengan modal materi semurah-murahnya, bisa memberi pendidikan bagi rakyat, perbaikan lingkungan, menjalin kegotong royongan maupun pembinaan spiritual. Gerakan seperti ini membuat hubungan antara kiai dengan masyarakat dan pemerintah lebih dekat dan intim.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Hasil Penelitian

Sebelum mengkaji hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan penulis kemukakan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Alasan kecamatan Wangon dipilih sebagai lokasi penelitian karena kehidupan masyarakat kecamatan wangon secara umum masih cukup sederhana yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Pendidikan masyarakatnya mayoritas hanya sekolah dasar. Sehingga pola pikir masyarakat kecamatan wangon masih cukup sederhana, seperti masih percaya pada hal-hal mistis, beberapa masyarakat kecamatan wangon percaya bahwa hari Sabtu paing adalah hari sial dan sebagainya. Dengan keadaan yang demikian maka sifat kepemimpinannya masih tradisional. Dan kepemimpinan seperti ini masih banyak diikuti oleh masyarakat setempat. Salah satu tokoh yang dianggap kharismatik dan dipercaya oleh masyarakat desa kecamatan Wangon adalah kyai. Sehingga petuah kyai sering diikuti oleh masyarakat desa yang masih bersifat tradisional tersebut.yaitu:

a. Letak, luas, batas-batas dan pembagian wilayah

1) Letak Kecamatan

Secara administratif Kecamatan Wangon termasuk dalam wilayah kabupaten Banyumas. Letak kecamatan Wangon ada di bagian barat kabupaten Banyumas.

2) Luas Kecamatan

Menurut data monografis statis kecamatan Wangon tahun 2003, luas kecamatan wangon secara keseluruhan kurang lebih 60.7823 km²

3) Batas batas Kecamatan

Kecamatan wangon terletak di bagian barat kabupaten Banyumas dan secara administratif batas kecamatan Wangon adalah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Ajibarang.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Jatilawang.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Jeruklegi.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Lumbir.

4) Pembagian Wilayah

Wilayah kecamatan wangon terdiri atas duabelas desa yang masing-masing dipimpin oleh satu kepala desa. Pembagian desa yang dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Desa Randegan
- b) Desa Rawaheng
- c) Desa Pengadegan
- d) Desa Klapagading
- e) Desa Klapagading Kulon
- f) Desa Wangon
- g) Desa Banteran
- h) Desa Jambu

- i) Desa Jurang bahas
- j) Desa Cikakak
- k) Desa Wlahar
- l) Desa Windunegara

b. Jumlah Penduduk

Penduduk kecamatan Wangon berjumlah 71.416 jiwa yang terdiri atas 35.781 jiwa laki-laki dan 35.635 jiwa perempuan (Sumber data monografis dinamis kecamatan Wangon perkeadaan bulan Januari 2003).

c. Keadaan Sosial Budaya

1) Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk suatu daerah dengan daerah lain tidak sama. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan letak geografis keadaan alam dan peradaban penduduknya. Penduduk kecamatan Wangon sebagian besar adalah petani, buruh, karyawan, wiraswasta , pedagang, PNS, dan TNI. Dengan demikian sebagian besar penduduk kecamatan Wangon adalah petani, karena sebagian besar wilayah di kecamatan Wangon adalah daerah sawah.

2) Agama

Masyarakat kecamatan Wangon merupakan masyarakat yang sembilan puluh sembilan persen memeluk agama Islam dan satu persen menganut agama lain. Masyarakat desa Klapagading, Klapagading kulon, Wangon, Banteran, dan Windunegara adalah desa

tempat aktifitas agama yang masih fanatik. Hal ini terlihat dari kehidupannya yang masih religius dan adanya pondok pesantren yang berdiri di Desa Klapagading.

3) Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat di gunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kemajuan suatu daerah. Penduduk kecamatan Wangon yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 26.164 jiwa, tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 25.107 jiwa, lulus Sekolah Menengah Pertama sebanyak 7.487 jiwa, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.983 jiwa, dan lulus perguruan Tinggi (PT) sebanyak 793.

d. Sarana dan Prasarana Umum Desa

1) Jalan dan alat transportasi

Jalan yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain di kecamatan Wangon sepanjang 66,33 km belum di aspal dan sepanjang 44,20 km sudah di aspal.

Sedangkan alat transportasi yang paling banyak digunakan adalah sepeda, sepeda motor, becak, truk, *colt*, mobil pribadi, dan mobil dinas. Hal ini sangat membantu proses mobilisasi di kecamatan Wangon.

2) Fasilitas Ekonomi

Di kecamatan Wangon sudah banyak berdiri industri rumah tangga sebanyak 9477 buah, industri kecil sebanyak 403 buah, industri sedang sebanyak 74 buah dan usaha penggalian batu pasir sebanyak 132 buah. Hal ini sangat membantu peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecamatan Wangon.

3) Fasilitas Pendidikan

Di kecamatan Wangon terdapat tiga buah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat, lima buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), lima puluh satu buah Sekolah Dasar (SD), dan dua puluh empat Taman Kanak-Kanak (TK) yang tersebar di masing-masing desa di kecamatan Wangon. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren, Tempat Pembelajaran Al Qur`an (TPQ), dan lembaga-lembaga Ketrampilan.

4) Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan rohani masyarakat. Di kecamatan Wangon terdapat tujuh puluh satu masjid, tiga ratus satu mushola dan tiga gereja. Dan masing-masing tempat ibadah tersebut dapat berfungsi dengan baik.

5) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Kecamatan Wangon. Di kecamatan Wangon

terdapat dua puskesmas, dua puskesmas pembantu, delapan polindes, dan seratus dua posyandu yang tersebar di berbagai desa.

2. Gambaran Umum tentang Responden dan Informan

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan informasi dan merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian (Moleong,2000:9). Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tiga orang kyai di kecamatan Wangon yang ikut aktif dalam partai politik di daerahnya. Tiga kyai ini pekerjaan setiap harinya adalah menjadi guru ngaji di masjid dan mereka memiliki sawah tetapi tidak di kerjakan sendiri. Selain itu kyai tersebut juga memiliki keahlian berpidato sehingga sering kali menjadi penceramah (*Maulidhoh Hasanah*) pada pengajian tertentu di sekitar wilayah kabupaten Banyumas bahkan sampai keluar kabupaten Banyumas. Kyai tersebut juga sering di datangi oleh orang-orang baik dari dalam kota maupun luar kota untuk dimintai obat, rajah dan do`a.

b. Informan

Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong,2000:9). Informan yang di maksud disini adalah aparat pemerintah, tokoh-tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan masyarakat desa kecamatan Wangon.

Penentuan informan dilakukan oleh peneliti dengan tehnik bertujuan. Ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel diambil di delapan desa, dengan memperhatikan usia, tingkat pendidikan, bidang pekerjaan dan yang mewakili orang Islam saleh dan kurang saleh. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang maka semakin luas ilmu yang diperoleh seseorang dan sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin sederhana pola pikirnya. Bidang pekerjaan yang di tekuni seseorang juga sangat mempengaruhi cara berpikirnya, karena berhubungan dengan akses informasi yang diperoleh dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan penulis dalam pengambilan sampel.

Tabel 1. Gambaran Informan dilihat dari tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1	Perguruan Tinggi (PT)	9	22,5 %
2	SMA/sedrajat	11	27,5 %
3	SMP/sedrajat	5	12,5 %
4	SD/ sedrajat	7	17,5 %
5	Tidak tamat SD	8	20 %
		40	100%

Tabel 2. Gambaran Informan dilihat dari mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persen (%)
1	Wiraswasta	7	17,5 %
2	Pedagang	10	25 %
3	Petani	3	7,5 %
4	PNS	4	10 %
5	Buruh	7	17,5 %
6	Karyawan	5	12,5 %
7	Ibu Rumah Tangga	3	7,5 %
8	Pelajar	1	2,5 %
		40	100

3. Latar Belakang Kiai terjun ke dunia politik.

Secara historis, dalam proses sosial politik kiai memiliki posisi yang strategis dan memainkan peran penting dalam setiap perubahan. Keterlibatan kiai tidak hanya terbatas dalam peran keagamaan, sosial dan kultural saja tetapi di luar bidang tersebut kiai juga ikut terlibat intens dalam perkembangan proses politik sejak Indonesia merdeka, masa kemerdekaan, dan sampai pada masa pembangunan sekarang ini.

Di saat menghadapi situasi sosial politik yang sulit pada masa orde baru, Nahdlatul Ulama (NU) secara organisatoris menyatakan menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi keagamaan yang di kenal dengan putusan kembali ke Khittah 1926, disini dijelaskan juga bahwa yang menjadi pengurus dalam partai politik harus keluar dari Nahdlatul Ulama (NU).

Secara historis, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki keterikatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sehingga secara personal memiliki tanggung jawab untuk menjaganya agar tidak keluar dari pakem Islam "*Ahlissunah waljama`ah*" dan garis-garis ke-NUan. Untuk menyerap suara dan aspirasi kaum nahdliyin yang begitu besar dan tidak melanggar Khittah NU 1926 merupakan alasan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sesuai yang diungkapkan kiai Hamam bahwa alasannya berpartisipasi aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dakwah demi umat, hal ini juga terdapat dalam Al Qur`an yaitu "*Kuntu*

Khairo Ummattin Akhrojatinnas ta`mulun mimma`rufattan”(bahwa kamu sekalian dijadikan oleh Alloh menjadi umat yang terbaik untuk berdakwah untuk berdakwah supaya menjadi yang terbaik “*Ammal Ma`ruf nahi munkar*” yaitu melakukan kebaikan dan mencegah kejelekan)(wawancara dengan kiai Hammam,24 februari 2005). Dan sebagai kiai atau ulama maka dia mengikuti para pemimpin Nahdlatul Ulama (NU). Dan ia juga mengungkapkan bahwa ulama adalah khalifah di bumi atau “*Khalifatul fil Ardi*” dan sebagai khalifah maka dia merasa memiliki tugas dari Alloh untuk mengajak dalam kebaikan. Sehingga menurutnya jika tidak ada ulama maka dunia akan menjadi binatang, pernyataan ini juga terdapat dalam Al Qur`an “*lailatul ulama lausatul bahara*”. Dan sebagai kyai dia menganjurkan pada umatnya untuk mengikuti Alloh dan rosul utusan Alloh dan orang-orang yang sedang mempunyai kekuasaan seperti dalam Al Qur`an “*Atiulloha wa`atiurrosul Waulilamri minkum* (wawancara dengan kyai Hamam,24 februari 2005). Sedangkan menurutnya partai adalah alat politik untuk mencapai kekuasaan sehingga agama jangan sampai di campuradukan dengan politik.

Dan lebih lanjut kyai jawawi mengungkapkan bahwa politik itu baik-baik saja asalkan untuk kemaslahatan umat, tetapi politik orang jahat bisa menjadi jahat karena hanya untuk mencapai sesuatu. Alasannya ikut andil dalam partai politik adalah asalkan partai tersebut lebih banyak berkecimpung, lebih banyak bermanfaat dan lebih banyak membantu

dalam pembangunan Islam. Dan dia menyarankan pada umatnya untuk memilih partai yang memperjuangkan kemaslahatan umat.

4. Bentuk atau Variasi Peran Politik Kyai di Pedesaan.

Dalam hal ini penulis mewawancarai tiga orang kyai yang dianggap memiliki peran besar di bidang politik yaitu Kyai jawawi, Kyai Hamam, dan Kyai Marko. Dilihat dari aktifitasnya kyai tersebut aktif dalam partisipasi politik, aktif dalam mencari dukungan untuk partai politiknya, peduli dengan organisasi politik, serta peduli dengan jalannya pemerintahan sebagaimana diungkapkan oleh salah satu kyai “Saya sering di ajak pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk menjadi pembicara dalam acara kampanye”(wawancara dengan kyai Hamam, 24 february 2005). Sosok kyai yang dekat dengan kehidupan spiritual sebenarnya dalam posisi mendua yaitu sebagai tokoh agama dan sebagai tokoh politik. Sebagai tokoh agama kyai menanamkan sistem nilai Islam yang menciptakan masyarakat yang religius. Dalam wilayah politik kyai menjadi media bagi umat Islam dalam meraih kepentingan politiknya. Kyai Hamam, Kyai Marko, dan Kyai Jawawi memberikan alasannya bahwa ikut sertanya dalam partai adalah dalam rangka dakwah demi umat. Bentuk-bentuk keterlibatannya dalam partai politik adalah sebagai berikut:

a. Mengikuti Kampanye pada Pemilu 2004

Pada pemilu 2004 kemarin kyai Marko di ajak oleh tokoh-tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Wangon untuk mengikuti kampanye. Menurutnya kampanye harus

dilakukan secara damai. Dan sebagai kyai dia lebih suka diam ketika orang disekitarnya mengkampanyekan partai lain, dengan sikap diam dan memberikan contoh sikap dan tingkah laku yang baik maka masyarakat akan mengetahui partai yang pantas untuk dipilih. Sesuai pernyataannya” *Wis pada pintere ikih, milihe ya kiye sing wis kaya wong tuane dewek, ya kari ndeleng toli wis teyeng milih mbok*”(wawancara dengan kyai Marko,26 februari 2005).

Pada pemilu sebelum 2004 kyai Hamam dan Kyai jawawi juga sering di ajak oleh tokoh politik dari PKB untuk mengisi acara kampanye (berpidato dalam acara kampanye). Kyai jawawi dan Kyai Hamam selain sebagai imam masjid dan guru ngaji dia juga memiliki keahlian berpidato, ini terbukti mereka sering di undang untuk mengisi pengajian (sebagai *Maulidhoh Hasanah*) baik di kecamatan Wangon maupun kecamatan lain. Bahkan mereka sering di undang di kabupaten lain seperti di Kabupaten Purbalingga, kabupaten cilacap, dan kabupaten lain.

Biasanya kampanye di lakukan dengan rute mulai dari sekitar pondok pesantren Darul Muttaqin menuju lapangan kecamatan Wangon.

b. Ceramah-ceramah Keagamaan atau pengajian

Selain untuk kampanye lapangan kecamatan Wangon sering di gunakan sebagai tempat pengajian dalam rangka kampanye partai tertentu. Pada waktu kampanye tamu undangannya adalah para kyai

yang berasal dari berbagai wilayah di kabupaten Banyumas yang mendukung partai tersebut dan beberapa kyai mengisi acara tersebut. Acara tersebut termasuk sukses karena dihadiri oleh para calon anggota legislatif dari partai tersebut dan dihadiri juga oleh para pendukung PKB dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam acara pengajian umum kyai jawawi memberi pesan-pesan politiknya tentang keunggulan partainya dan anjuran untuk memilih partainya. Hal ini sesuai dengan ungkapan salah seorang responden yaitu Sudarti” *Wektu pegajian ning Windunegara aku mangkat pak jawawi nyritakaken keunggulane PKB*”(waktu pengajian di windunegara saya berangkat pak jawawi menceritakan keunggulan PKB)(wawancara dengan Sudarti, 11 februari 2005).

- c. Memberikan Anjuran kepada Masyarakat untuk mengikuti Kegiatan Kampanye.

Acara kampanye dilakukan sebelum pemilihan umum berlangsung. Dalam kampanye pemilu rakyat memiliki kebebasan untuk menghadiri kampanye. Kegiatan kampanye di lakukan oleh peserta pemilu selama tiga minggu dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Materi kampanye pemilu berisi program peserta pemilu. Penyampaian materi kampanye di lakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperhatikan usul dari peserta pemilu.

Cara yang digunakan kyai Marko agar masyarakat mengikuti kampanye adalah dengan memerintahkan warga masyarakat yang dekat dengannya serta loyal pada PKB memberitahukan kepada anggota masyarakat lain untuk mengikuti kampanye.

Jenis kampanye yang digunakan biasanya bersifat pengerahan massa biasanya di mulai dari lingkungan pondok pesantren Darul Muttaqin menuju ke tempat kampanye berada. Untuk mengangkut masyarakat ke tempat kampanye beberapa warga merelakan mobilnya untuk keperluan kampanye. Kamil Mustofa adalah salah satu warga yang merelakan mobilnya untuk mengikuti kampanye.

d. Rapat Partai

Sebelum melaksanakan berbagai kegiatan menjelang pemilu, biasanya para tokoh politik mengadakan rapat bersama untuk membahas berbagai program sebelum pemilu berlangsung. Dalam acara rapat partai tersebut tokoh politik mengundang kyai untuk memberi saran dan kritik tentang programnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan kyai Marko "*Pas pemilu wingi aku di undang rapat partai ning pak Tarom, mbahas persiapan kanggo pemilu*"(Pada waktu pemilu kemarin saya di undang rapat partai oleh pak tarom untuk membahas persiapan pemilu)(wawancara dengan kyai Marko, 26 februari 2005). Saat ini pak Tarom adalah pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di desa klapagading, sebelum menjadi PNS dia aktif dalam PKB.

Menurut Sobirin salah satu tokoh politik PKB, dalam rapat partai tersebut kyai memberi pesan pada tokoh politik PKB untuk bersaing secara sehat. Sebagai seorang tokoh politik PKB maka mereka harus memperjaungkan Islam, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tetapi harus memperhatikan *Akhlakul Karomah*.

5. Interaksi antara Kyai dengan Tokoh-tokoh Politik dan Pemerintah

a. Interaksi antara Kyai dengan Tokoh-tokoh Politik

Para tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecamatan Wangon sering mengadakan acara-acara tertentu dengan para kyai. Acara tersebut misalnya:

- 1) Mengadakan kerjasama memperingati hari besar Islam
- 2) Mengadakan do`a bersama (*istighosah*). 3.) Pertemuan Pengurus
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) yang di adakan secara periodik.
- 4) Peringatan hari lahir (harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sengaja mengundang para kyai.
- 5) Para tokoh politik meminta saran dari kyai sebelum mengadakan acara kepartaian.
- 6) Melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren bersama kyai.
- 7) Silaturahmi dan kampanye partai politik bersama kyai
- 8) Rapat Partai bersama para kyai

Menurut Sobirin seorang pengurus anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecamatan Wangon, yang pernah menjabat sebagai pengganti antar waktu wakil bupati Banyumas Imam Dukhori dalam waktu 15 juli 2003 sampai dengan maret 2004 alasannya setuju dengan partai yang sama dengan kyainya adalah karena untuk keberhasilan dan kemaslahatan umat. Menurutnya jika kyai tidak terjun langsung ke dunia politik maka kepentingan agamanya tidak akan terwujud seperti pembangunan masjid, pembangunan pesantren dan sarana prasarana lainnya. Dan jika kyai terjun langsung ke dunia politik maka pembuatan kebijakan-kebijakan, Undang-undang (UU), dan Peraturan Daerah (Perda) akan dijiwai oleh moral agama. Karena moral agama dapat dijadikan sebagai pegangan untuk melaksanakan politik yang sehat dan menghindari pemerintahan yang korup. Saran-saran yang diberikan kyai kepada para tokoh politik pada saat melaksanakan kegiatan parpol antara lain:

- 1) Hendaknya para tokoh politik bisa membedakan antara yang *maslahat* dan *madhorot* terkait dengan masalah politik agar dapat meminimalkan perpecahan.
- 2) Mengembangkan sikap politik yang santun tidak menghalalkan segala cara dalam berpolitik.

Menurut Sobirin alasannya lebih memilih kampanye bersama kyai dan santri adalah karena mereka lebih di hormati oleh masyarakat. Dan hubungan antara dirinya dengan kyai lebih akrab karena memiliki

satu aspirasi dan kepentingan yang sama, memiliki akidah yang sama yaitu akidah Islam, satu ideologi yang sama dan diantara mereka saling mengkritik satu sama lain. Cara-cara yang dilakukan para tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendapatkan dukungan para kyai dalam kampanye partai adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Silaturahmi yaitu menjalin hubungan antara seorang muslim satu dengan yang lain dengan cara saling mengunjungi.
- 2) Banyak membantu kepentingan kyai dalam mengembangkan agama seperti pada waktu renovasi masjid seperti yang sudah terealisasi yaitu adanya sarana ibadah di karang tengah desa Banteran dan Taman Kanak- Kanak di desa Ranjingan.
- 3) Sering mengikuti kegiatan keagamaan bersama kyai.
- 4) Mengkondisikan agar tercipta iklim yang sejuk selama kampanye berlangsung.
- 5) Merespon program-program yang disampaikan kyai.

Menurut Sobirin salah satu tokoh politik, saran-saran yang diberikan oleh kyai tidak selalu harus dilakukannya tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu serta mempertimbangkan situasi yang nyata yang ada dalam masyarakat atau *konstituen*. Dalam rapat partai kyai seringkali menginginkan bahwa dalam kursi pemerintahan diisi oleh orang-orang dari golongan sendiri yaitu dari orang-orang Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya sebagian besar orang Indonesia adalah NU tetapi untuk mengisi jabatan-jabatan seperti di

Kantor Urusan Agama (KUA) belum ada orang dari NU(wawancara dengan Sobirin, 13 maret 2005).

b. Interaksi antar Kyai dengan Pemerintah

Interaksi antara kyai dengan pemerintah terlihat jelas di beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, bidang soial, bidang politik dan sebagainya.

Di bidang pendidikan adanya pesantren yang didirikan para kyai di kecamatan Wangon telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Pesantren memiliki peran penting karena merupakan sistem pembelajaran dan pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum sistem pendidikan di lakukan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pesantren di Indonesia masih memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan norma agama. Di kecamatan Wangon terdapat beberapa pesantren yang memiliki peran besar di dunia pendidikan. Salah satunya adalah pesantren darul Muttaqin yang ada di desa Klapagading, pesantren ini memiliki kurang lebih seratus orang siswa yang berasal dari berbagai daerah di indonesia.

Selain pesantren juga terdapat tempat pendidikan seperti madrasah (sekolah), murid sebuah madrasah harus lulus satu tingkatan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi, sama dengan pola sebuah sekolah umum. Beberapa bulan sekali saat peringatan hari besar keagamaan siswa –siswa berbagai madrasah dari tiap-tiap desa

mengadakan berbagai pertandingan seperti pidato, cerdas cermat, dan sebagainya. Hal ini dapat terlaksana atas kerjasama dari berbagai pihak yaitu antara para kyai, pemerintah, dan masyarakat kecamatan Wangon. Dalam sistem pesantren ada tiga unsur yang saling terkait yaitu:

- 1) Kyai yaitu faktor utama yang memimpin pesantren. Beberapa pesantren di kecamatan Wangon dipimpin oleh kyai yang sebelumnya telah memperoleh pendidikan di Jawa Timur. Kyai Marko adalah salah satu kyai yang mengasuh di ponpes tersebut.
- 2) Santri yaitu para murid yang belajar pengetahuan ilmu agama dari kyai.
- 3) Pondok yaitu asrama yang di sediakan oleh kyai untuk tempat tinggal para muridnya.

Di bidang sosial pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran Islam yaitu sebagai media sosialisasi formal dimana keyakinan, nilai-nilai, dan norma ditransmisikan dan ditanamkan melalui pengajaran yang di lakukan secara periodik.

Kyai di kecamatan Wangon juga sering diundang dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. “ Saya sering diundang dalam acara *istigoshah* bersama dan peringatan hari besar keagamaan oleh pemerintah setempat” (wawancara dengan kyai Jawawi, 24 februari 2005). Ketika pemberangkatan pasukan Angkatan Darat ke Aceh beberapa kyai juga di undang untuk mengisi siraman

rohani untuk para prajurit. “*Wingi aku diundang kon teka ning batalyon 405 Wangon, ngisi pengajian nggo tentara sing arep ning Aceh*” (Kemarin saya saya disuruh datang ke Batalyon 405 mengisi siraman rohani untuk yang akan berangkat ke Aceh)(wawancara dengan kyai Marko,25 februari 2005).

Pemerintah setempat juga sering di undang oleh para kyai untuk menghadiri acara yang di selenggarakan oleh para kyai. Seperti khataman kitab “*Ikhya Ulumudin*” dan gebyar rebana seperti yang dilaksanakan pada hari jum`at 26 november 2004 yang lalu di komplek ponpes *Darul Muttaqin* desa klapagading.

Menurut beberapa responden pada masa orde baru (orba), kyai Hamam dan kyai jawawi pernah bergabung dengan partai Golkar. Sesuai pernyataannya “Saya dulu pernah bergabung dengan Golkar ini dilakukan pada waktu itu hanya untuk mengakrabkan hubungan antara *ulama* dan *umaroh* (wawancara dengan kyai Hamam, 25 februari 2005). Karena pada waktu itu kyai di anggap musuh oleh umaroh (pemerintah). Pada saat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum berdiri, partai yang diikuti kyai adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pada waktu itu antara para ulama dan pemerintah sering tidak sepaham. Karena pada waktu itu ulama dianggap memiliki tujuan dan cita-cita yang berbeda dengan pemerintah. Sehingga ulama sering di anggap musuh bagi pemerintah. Hal ini juga di ungkapkan oleh beberapa responden yang pernah ditanya oleh salah seorang temannya

“Mba darti kepriwe sih kyaine njenengan deneng melune Golkar”(Mba darti bagaimana sih kyainya kamu ikut Golkar)(wawancara dengan Sudarti,11 Maret 2005).Responden lain juga mengungkapkan bahwa *“ Kyai jawawi gemiyen melu PPP, terus Golkar, siki PKB”*(kyai jawawi dulu ikut PPP, kemudian Golkar, dan sekarang PKB)(wawancara dengan rifatul,11 Maret 2005).

Keberadaan kyai juga membantu pemerintah dalam membekali masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Sehingga keamanan di lingkungan tersebut semakin terjamin. Selain itu program-program yang di selenggarakan oleh pemerintah akan mudah di terima masyarakat jika disampaikan oleh kyai seperti saran untuk membayar pajak, membantu korban bencana alam untuk aceh baik dalam bentuk materi maupun nonmateri.

6. Preferensi Politik Masyarakat dalam Pemilu

Masyarakat di kecamatan Wangon pada umumnya memiliki mata pencaharian bercocok tanam dan pendidikan masyarakatnyapun masih rendah. Dengan kehidupannya yang sederhana tersebut pola pikir masyarakat kecamatan Wangon masih bersifat tradisional. Sehingga dalam segala pengambilan keputusan masih memperhatikan saran-saran dari pemimpinnya.

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka para ulama khususnya para kyai di desa menerima penghormatan yang

tinggi dari masyarakat. Kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada wilayah agama tetapi juga politik. Keberhasilannya dalam peran kepemimpinan menjadikannya semakin kelihatan sebagai orang yang berpengaruh dan mudah untuk menggerakkan aksi sosial di kecamatan Wangon. Menurut beberapa responden seorang kyai wajib di hormati karena beberapa alasan yaitu:

- a. Kyai adalah orang yang dituakan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap kyai seperti orang tua sendiri.
- b. Kyai memiliki banyak ilmu agama yang tinggi dan setiap orang tidak bisa memilikinya.
- c. Saran atau petuah yang disampaikan kyai sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.
- d. Kyai memiliki kharisma yang biasanya di peroleh dari keturunan ataupun kelebihan yang di berikan dari Tuhan YME.

Dari alasan diatas dapat menjadi pedoman bagi warga dilingkungannya untuk mengikuti apa yang disarankan kyai baik dibidang politik maupun non politi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan warga masyarakat dalam pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti Partai Politik sesuai dengan Pemimpin Agama

Menurut Wahyuni alasannya memilih parpol yang sesuai dengan kyai karena dirinya patuh pada pemimpin dan pemimpin yang memiliki pondasi agama yang kuat maka pemerintahan akan dilakukan

dengan penuh tanggung jawab baik pada diri sendiri maupun pada Tuhan serta akan bersikap adil dan bijaksana untuk rakyatnya.

Kyai jawawi tidak memiliki pondok pesantren tetapi memiliki masjid dan madrasah sebagai tempat pendidikan. Dia sering mengikuti Mukhtamar NU yang diselenggarakan lima tahun sekali di Indonesia. Sehingga segala sesuatu yang dibahas dalam mukhtamar tersebut akan disampaikan pada para jamaahnya untuk diikuti oleh masyarakat.

b. Memilih Parpol sesuai dengan Organisasi Keagamaan

Salah satu organisasi keagamaan yang memiliki anggota terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) yaitu memiliki anggota sekitar empat puluh juta orang. Posisi yang strategis tersebut sangat mungkin untuk dimanfaatkan orang sebagai sarana politik.

Secara historis Partai Kebangkitan Bangsa memiliki hubungan yang erat dengan Nahdlatul Ulama (NU) yaitu sebagai wadah politik bagi organisasi tersebut. Salah satu responden menyatakan “*Aku milih partai sing pada karo pemimpin, mergane aku wong NU ya aku milih partai sing pada karo organisasiku yaiku PKB*”(Saya memilih partai yang sama dengan pemimpin, karena saya orang NU maka saya memilih partai yang sama dengan organisasi saya yaitu PKB) (wawancara dengan Siti Asiyah, 26 februari 2005). Menurutnya sebagai orang yang beragama Islam maka dia memilih PKB dan alasan lain dirinya memilih PKB adalah karena kyai sebagai panutan atau pemimpin kita baik di dunia maupun di akherat nanti.

c. Kyai sebagai figur pemimpin pusat Partai Politik

Sebagian masyarakat kecamatan Wangon dalam memilih partai dalam pemilu tahun 2004 melihat sosok pemimpin partai yang dianggap mampu untuk memimpin bangsa dan negara, memihak rakyat kecil, dan memperhatikan aspirasi rakyat. Ini sesuai dengan pernyataan Sukini “Aku wingi milih Hasim Muzadi mergane pak hasyim kyai lan pemimpine NU”(Saya kemarin memilih Hsyim Muzadi karena pak hasyim adalah seorang kyai dan pemimpin NU)(wawancara dengan Sukini 17 february 2005). Ini menunjukkan bukti ketaatan jamaah kepada kyainya.

d. Memilih pemimpin yang pendukungnya banyak

Salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan warga kecamatan Wangon dalam memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 adalah dengan melihat banyak sedikitnya pendukung tanpa melihat program, visi, dan misi calon yang bersangkutan. Ini sesuai pernyataan salah satu responden” *Aku milih partai sing pada karo bapake*”(saya memilih partai yang sesuai dengan bapak saya)(wawancara dengan Ratini,17 february 2005). Dukungan masyarakat dalam pemilihan umum terlihat jelas dari hasil pemilu di kecamatan wangon pada tahun 2004 yang lalu.

**HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILU 2004 KECAMATAN WANGON
UNTUK CALEG DPR RI, DPR PROPINSI, DPR KABUPATEN/ KOTA**

No	Nama Partai Peserta Pemilu	DPR RI	DPRD propinsi	DPRD KAB /KOTA
1	Partai Nasional Indonesia Marhenisme	103	115	109
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	78	77	69
3	Partai Bulan Bintang	1300	1320	1840
4	Partai Merdeka	51	48	59
5	Partai Persatuan Pembangunan	742	769	737
6	Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan	35	48	50
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	21	37	28
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	137	126	114
9	Partai Demokrat	3108	3060	2650
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	85	92	121
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	239	294	234
12	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	38	34	34
13	Partai Amanat Nasional	5211	4951	5095
14	Partai Karya Peduli Bangsa	581	583	545
15	Partai Kebangkitan Bangsa	5093	5163	5299
16	Partai Keadilan sejahtera	1560	1648	1530
17	Partai Bintang Reformasi	98	85	72
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.127	13.219	12.674
19	Partai Damai Sejahtera	172	168	157
20	Partai Golongan Karya	8.191	8.160	8.480
21	Partai Patriot Pancasila	22	23	17
22	Partai Serikat Indonesia	40	54	0
23	Partai Persatuan Daerah	65	36	37
24	Partai Pelopor	20	22	20
	JUMLAH	40.117	40.132	39.856

**Hasil Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Di setiap desa Kecamatan Wangon, Kabupten Banyumas 2004**

No	DESA	DPR RI	DPR propinsi	DPR Kab/Kota
1	Pengadegan	237	239	235
2	Rawaheng	149	158	156
3	Randegan	348	363	371
4	Klapagading	1202	1180	1245
5	Klapagading Kulon	768	779	795
6	Wangon	275	287	275
7	Banteran	583	594	637
8	Jambu	654	652	684
9	Jurang Bahas	149	149	136
10	Cikakak	179	181	200
11	Wlahar	83	100	91
12	Windunegara	387	396	351

**Prosentase Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setiap desa di
Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas pada pemilu 2004**

No	DESA	DPR RI	DPR Propinsi	DPR Kab/Kota
1	Pengadegan	7,6 %	7,7 %	7,57 %
2	Rawaheng	5,8 %	6,34 %	6,05 %
3	Randegan	12,52 %	13,42 %	14,13 %
4	Klapagading	21,85 %	21,83 %	22,76 %
5	Klapagading Kulon	13,05 %	12,8 %	13,25 %
6	Wangon	5,15 %	5,36 %	5,14 %
7	Banteran	20,54 %	21,83 %	23,63 %
8	Jambu	18,6 %	18,9 %	19,5 %
9	Jurang bahas	10,58 %	11,01 %	9,66 %
10	Cikakak	5,92 %	6,08 %	6,5 %
11	Wlahar	4,09 %	4,9 %	4,73 %
12	Windunegara	17,67 %	17,35 %	16,9 %

JUMLAH PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN KE PPK KECAMATAN WANGON

No	DESA	HJ. MEGAWATI S KH.HASYIM MUZADI	H. SUSILO BAMBANG Y DRS.H. JUSUF K
1	Windunegara	1.251	981
2	Wlahar	1.287	779
3	Cikakak	1.492	970
4	Jambu	2.133	1.431
5	Banteran	1.357	1.326
6	Jurang Bahas	619	787
7	Wangon	2.802	2.851
8	Klapagading kulon	3.291	2.767
9	Klapagading	3.120	2.471
10	Randegan	1.511	2.152
11	Rawaheng	1.476	1.131
12	Pengadegan	1.860	1.389
	JUMLAH	22,199	19,035

Pembahasan

1. Variasi atau Bentuk peran politik Kyai
 - a. Alasan kyai terjun ke dunia politik

Kegagalan politik Islam mendorong kyai untuk membebaskan umatnya dari kewajiban menganut orientasi politik tertentu. Keterlibatan kyai adalah merupakan gerakan moral karena di landasi keikhlasan berjuang tanpa pamrih. Politik menyangkut kepentingan orang banyak sehingga dalam segala pengambilan keputusan sangat di butuhkan orang-orang yang bermoral tinggi. Hal ini menjadikan kyai bersama para tokoh politik dari partainya merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk terlibat dalam wilayah politik.

Menurut kyai Jawawi dakwah melalui politik adalah baik-baik saja sepanjang demi kemaslahatan. Jika wilayah politik di pegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka yang terjadi adalah sebuah kemunduran. Dan alasannya terlibat dalam politik adalah karena dakwah demi umat, untuk membantu orang banyak, dan bermanfaat bagi pengembangan Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu ulama: adalah filsafat kehidupan, sebuah ideologi, sebuah sistem

“Islam kehidupan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat. Karena itu kita sebagai orang muslim tidak bisa melepaskan diri dari ideologi kita sendiri, yaitu Islam. Bagi kita, membangun Islam tidak bisa dipisahkan dari membangun masyarakat, membangun negara dan membangun kebebasan. Berkaitan dengan membangun hubungan manusia dengan sesamanya fungsi agama adalah menjaga hubungan itu dalam semua aspek kehidupan. Disini kita harus memperhatikan fungsi politik dalam menjaga hubungan tersebut. Apakah politik mencakup semua aspek kehidupan atau semuanya? Politik hanya merupakan satu aspek dari hubungan antara manusia dengan sesamanya. Sementara fungsi agama adalah menjaga hubungan ini dalam semua aspek kehidupan. Maka bagaimana mungkin agama yang meliputi semua aspek kehidupan dapat dipisahkan dari politik yang hanya meliputi satu aspek saja?”(Natsir dalam Turmudi:2004,230).

Menurut Emile Durkheim yang di kutip oleh Azyumardi Azra:2004,xviii dia membagi dunia dalam dua pikiran yaitu *Profane* dan *Sacred*. Istilah *profane* secara umum di gunakan untuk menandai segala sesuatu yang berkaitan dengan duniawi, berkaitan dan berasal dari kehidupan sehari-hari. *Sacred* secara umum di gunakan untuk menandai segala sesuatu yang berasal dari dunia adikodrati. *Sacred* dan *profane* yang dipisahkan tersebut sering bersatu dengan akal

pikiran manusia. Kekuasaan berasal dari dunia profan dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun demikian dunia *profane* ini seringkali meminjam dunia yang *sacred*. Hal ini bisa dipahami dengan merunut terbentuknya kekuasaan. Yang menandai pola interaksi antara pemimpin dan sekelompok orang yang dipimpin, antar penguasa dengan sekelompok orang yang di kuasai, antara yang memerintah dengan sekelompok orang yang diperintah terbentuk ketika manusia membangun kelompoknya dan harus bersaing dengan kelompok lain untuk tetap *survive*. Di dalam persaingan tersebut kawan manusia memerlukan pemimpin, yaitu yang *primus inter pares*, terbaik, terpandai, dan terkuat di antara mereka. Bentuk atau variasi keterlibatan kyai dalam politik antara lain:

1. Menjadi juru kampanye pada pemilu 2004

Kyai Jawawi dan kyai Marko pada pemilu 2004 telah banyak berperan aktif menjadi juru kampanye di kecamatan Wangon. Melalui pengajian yang di adakan secara periodik mereka menyampaikan pesan-pesan politiknya tentang keunggulan partai tertentu dan menyarankan untuk memilih partai tersebut dalam pemilu.

Meskipun hanya melalui ceramah-ceramah keagamaan tetapi menurut penulis kyai tersebut telah melakukan kegiatan politik. Bahkan istri dari kyai Marko sering menyarankan kepada jamaahnya untuk memilih partai tertentu.

Menurut penulis Kyai Jawawi, kyai Hamam, dan kyai Marko adalah warga negara yang aktif dalam partisipasi politik, karena melihat perilaku politiknya dalam pemilu yang terwujud dalam memberikan suara, aktif mencari dukungan dalam masyarakat untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan mengikuti kampanye parpol bersama masyarakat dan tokoh politik.

Menurut Endang Turmudi kyai dapat di bedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Kyai pesantren yaitu kyai yang memusatkan perhatiannya di pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan.
- 2) Kyai tarekat yaitu kyai yang memusatkan perhatiannya dalam membangun batin masyarakat melalui ritual keagamaan.
- 3) Kyai politik yaitu kyai yang memiliki *concern* untuk mengembangkan NU secara politik.
- 4) Kyai panggung yaitu mereka yang menyebarkan Islam melalui dakwah.

Meskipun demikian satu orang kyai dapat di golongan lebih dari satu kategori. Menurut penulis kyai Jawawi, kyai Hamam, kyai Marko termasuk dalam kategori Kyai tarekat, kyai politik dan kyai panggung sehingga mereka cukup di kenal oleh masyarakat.

2. Mengadakan Acara Pengajian atau Ceramah Keagamaan

Pengajian menjelang pemilu 2004 di laksanakan di Lapangan Jatilawang atas kerjasama kyai dan tokoh politik. Pengajian ini berupa pengerahan massa. Menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam kampanye pemilu di larang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu.
- c) Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun kelompok masyarakat.
- d) Mengganggu ketertiban umum.
- e) Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain.
- f) Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
- g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Jenis kampanye tersebut adalah berupa pengerahan masa sehingga terjadi banyak pelanggaran seperti gangguan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, dan perkelahian antara pendukung partai. Menurut pasal 76 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 penyelesaian masalah tersebut melalui:

- a) Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- b) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

3. Memberikan Anjuran untuk Mengikuti Kampanye

Kampanye adalah usaha dan kegiatan yang di lakukan secara terencana dan terarah yang dilakukan secara serempak untuk memenangkan pendapat umum. Sedangkan pendapat umum adalah sikap bersama di kalangan masyarakat luas mengenai suatu hal. Pendapat umum pada hakekatnya adalah keinginan di kalangan orang banyak. Sifat pendapat umum biasanya dinamis, menguasai alam pikiran, serta mempengaruhi pikiran orang banyak. Kampanye yang di rencanakan dengan baik akan mempengaruhi kelancaran jalannya kampanye. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, kampanye pemilu dapat di lakukan melalui:

- a) Pertemuan terbatas.
- b) Tatap muka
- c) Penyenaran melalui media cetak dan elektronik
- d) Penyiaran melalui radio dan atau televisi
- e) Penyiaran bahan kampanye kepada umum
- f) Pemasangan alat peraga di tempat umum.

g) Rapat umum

h) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

4. Rapat Partai

Rapat partai yang di adakan oleh para tokoh politik dengan memengundang kyai adalah untuk membahas berbagai hal yang di lakukan menjelang pemilu. Menurut penulis ini di lakukan untuk mendapat dukungan dari para pengikut kyai. Disini kyai memberi masukan, saran, dan kritik kepada para tokoh politik. Meskipun tidak semua saran dan kritik kyai di lakukan oleh tokoh politik. Beberapa hal yang di bahas dalam rapat tersebut antara lain:

a. Program PKB

b. Rencana-rencana kerja partai yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat dan sebagainya.

2. Interaksi antara kyai dengan Tokoh-tokoh politik dan pemerintah.

a. Interaksi antara Kyai dengan Tokoh-tokoh Politik.

Beberapa cara yang di tempuh oleh tokoh-tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilu adalah:

1) *Door to door* yaitu datang dari rumah ke rumah, menjelaskan pada masyarakat akan pentingnya memilih PKB dalam pemilu 2004.

2) Silaturahmi pada tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama, kyai, ketua RT/RW, kades, tokoh pemuda dan sebagainya.

- 3) Mempengaruhi forum-forum masyarakat mulai dari forum pengajian, karang taruna , kelompok olah raga, kelompok tani, nelayan, buruh dan sebagainya.
- 4) Mempromosikan PKB kepada siapapun dan dimanapun berada (Sumber buku panduan untuk kader PKB 2003).

Menurut penulis interaksi antara kyai dan tokoh-tokoh politik sangat erat karena di antara mereka memiliki aqidah yang sama, aspirasi politik yang sama, kepentingan politik yang sama serta memiliki wawasan dan cara pandang yang sama pula.. Hal ini akan menyatukan mereka dalam berjuang meraih tujuan partainya. Terpilihnya tokoh politik dari PKB diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat akar rumput akan tercapai.

Dengan keterlibatan kyai dalam politik maka kyai berfungsi sebagai jembatan untuk menyalurkan suara dari pengikutnya kepada para tokoh politik yang terpilih. Maksudnya segala keinginan masyarakat di tingkat bawah akan di sampaikan kepada para tokoh politik yang duduk di lembaga legislatif untuk diusulkan pada pemerintah. Sehingga disinilah fungsi partai sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat akan tercapai.

Bentuk dukungan para kyai terlihat jelas ketika ceramah keagamaan seringkali menyampaikan bahwa dirinya menginginkan pemimpin yang segolongan dengannya. Menurut penulis permintaan

dukungan para tokoh-tokoh politik kepada para kyai adalah dengan maksud supaya para jamaah kyai tersebut mendukung tokoh politik yang bersangkutan. Karena seringkali apa yang dipilih kyai dalam pemilu sering diikuti oleh masyarakat dilingkungannya.

b. Interaksi antara Kyai dengan Pemerintah

Interaksi antar kyai dengan pemerintah terlihat jelas ketika pemerintah mengadakan acara tertentu kyai sering menjadi tamu undangan. Dengan begitu masyarakat akan datang. Acara-acara dan kegiatan yang di adakan oleh pemerintah akan sukses jika mendapat dukungan para kyai. Seorang ahli menyatakan bahwa

“Reproduksi simbol diantara sekian cara yang paling banyak dilakukan dalam proses membangun kekuasaan di elite penguasa jawa adalah produksi dan reproduksi simbol tersebut diambilkan dari banyak sumber terutama yang menyebar di tengah masyarakat, baik dari sumber budaya lokal, tradisional, modern, militer dan juga agama. Diantara sekian simbol yang menyebar, agama tidak saja terkategori sebagai simbol legitimasi yang paling menyebar tetapi juga paling efektif. Oleh karena itu elite penguasa saat ini cenderung menggunakannya sebagai alat hegemoni, sebagai sarana mengakumulasi kepercayaan dan dukungan masyarakat” (azyumardi Azra, 2004:309). Mereka mengambil perangkat simbol keagamaan sebagai sarana kekuasaan yaitu sebagai berikut:

1) Penggunaan simbol agama dalam kekuasaan

Mengingat agama sebagai sumber legitimasi yang menyebar, maka agama dengan berbagai simbolnya merupakan sumber daya politik yang efektif untuk meraih kekuasaan. Ada kecenderungan semua elite penguasa mengambil simbol agama sebagai sarana kekuasaan dengan berbagai formulasi, mulai dari:

- a.) Menggunakan berbagai properti atau *icon* keagamaan. Ini seperti pemakaian kosakata keagamaan, menjalankan berbagai ritus keagamaan rakyat seperti istigoshah dan tahlil.
- b.) Menjalin hubungan dengan pimpinan, armas, dan partai keagamaan. Terjadinya perubahan sistem politik Indonesia maka Indonesia mengalami masa transisi, sistem politik yang di gunakan adalah multipartai yang berimplikasi pada penyebaran konstituen. Itulah sebabnya elite penguasa di pemerintahan lokal harus berempati dengan pemimpin, ormas keagamaan maupun parpol yang berkuasa beserta konstituennya.
- c.) Memobilisasi dukungan kelompok maupun institusi agama, terutama elite agama seperti kyai dan ulama.
- d.) Merekrut staf yang mempresentasikan kelompok keagamaan tertentu dalam jabatan yang strategis.
- e.) Formalisasi kebijakan keagamaan seperti pembuatan kebijakan, institusi, pengnggaran kegiatan, pembangunan sarana ibadah maupun penyediaan fasilitas keagamaan.

2) Obyektifikasi Simbol aparatus represif.

Aparatus represif yang dahulu di monopoli negara sehingga pemilih dan penentu seseorang untuk dapat menduduki jabatan strategis bukan datang dari bawah melainkan dari elite kekuasaan di pemerintahan pusat.

Di kecamatan Wangon, baik pemimpin di kecamatan maupun di desa sering menggunakan salam keagamaan dalam acara-acara formal. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara umaraoh dan ulama. Pernah masuknya kyai Jawawi dan Kyai Hamam ke Golkar pada waktu sebelum masuk PKB merupakan salah satu bukti adanya interaksi yang erat antara pemerintah dan kyai. Karena pada saat orde baru (ORBA) aparat pemerintah diwajibkan mendukung Golkar (politik massa mengambang) sehingga untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat kecamatan Wangon maka pemerintahan pada waktu itu mencari dukungan dari para kyai. Karena kyai di kecamatan Wangon memiliki massa yang banyak dan termasuk menggerakkan aksi-aksi sosial. Sehingga pada waktu itu pilihan masyarakat yang semula ke PPP menjadi terbagi ke Golkar. Menurut penulis pada waktu itu mereka mendukung Golkar karena dua alasan yaitu:

a.) Pemerintah adalah pemimpin sebagaimana kyai dan legitimasi kekuasaan yang pertama perlu di dukung sepanjang ia bukan merupakan kekuasaan yang korup.

b.) Pemerintahan dalam pandangan yang paling sering dinyatakan kyai, telah berbuat banyak bagi masyarakat kecamatan Wangon yang mayoritas penduduknya Islam dengan demikian sebenarnya pemerintah telah banyak memberi keuntungan bagi masyarakat setempat.

Untuk saat ini interaksi antara kyai dengan pemerintah terlihat jelas di bidang pendidikan yaitu melalui pesantren dan madrasah yang dimiliki oleh kyai. Ini sangat membantu perkembangan dunia pendidikan di kecamatan Wangon. Di bidang sosial, kyai mampu mentransfer berbagai pengetahuan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga masyarakat di kecamatan Wangon tidak mudah terpancing dengan isu-isu sosial. Kyai juga sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, karena apa yang dikehendaki oleh masyarakat tingkat bawah akan disampaikan oleh kyai kepada pemerintah setempat melalui acara-acara yang mereka ikuti bersama.

3) Pengaruh kyai terhadap Preferensi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (pemilu).

Pengaruh kyai terhadap preferensi politik masyarakat kecamatan wangon di pengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a) Mengikuti partai pilihan pemimpin agama

Hubungan antara kyai dan masyarakat lahir dari persepsi masyarakat bahwa kepemimpinan kyai adalah nyata dan kyai

adalah seorang ahli yang dapat memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Al`Quran. Seringkali terjadi pula bahwa kebanyakan orang suci atau *syekh* mempunyai hubungan geneologis dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kepemimpinan mereka dianggap sah. Kyai juga dianugrahi sifat-sifat simbolik tertentu yang membuatnya berbeda dengan masyarakat lain. Konsep ini membuat masyarakat menaruh rasa hormat yang tinggi pada kyai dan tunduk kepada kepemimpinannya.

Dengan kelebihan tersebut maka seringkali apa yang dilakukan kyai diikuti oleh masyarakatnya, termasuk sikap pilihan kyai dalam pemilu. Meskipun tidak semua masyarakat mengikutinya. Masyarakat yang mengikuti biasanya masyarakat saleh yang memiliki hubungan dekat dengan kyai. Dan yang tidak mengikuti adalah kerompok *abangan* yaitu orang yang mengaku Islam tetapi pengetahuan agamanya sangat umum.

b) Memilih parpol sesuai dengan organisasi keagamaan.

Kepentingan ulama dalam politik di realisasikan dengan keterlibatan mereka dalam parpol Islam. Sebagai wadah penyalur aspirasi kaum nahdliyin. Partai kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki cita-cita politik yang bersumber dari landasan politik NU. Dengan merujuk pada landasan politik NU dan cita-cita politik partai maka setiap anggota dan aktifis PKB harus mengembangkan pola hubungan dengan NU yang bersifat historis, kultural, dan aspiratif.

- 1.) Hubungan historis berarti setiap anggota dan aktifis PKB menyadari bahwa partai ini dirintis dan dilahirkan oleh warga NU secara perseorangan, sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik NU yaitu mengangkat harkat dan martabat warganya.
 - 2.) Hubungan kultural berarti setiap anggota dan aktifis PKB menyadari bahwa partai ini lahir dari suatu lingkungan kebudayaan dan keagamaan yang khas.
 - 3.) Hubungan aspiratif berarti setiap anggota dan aktifis PKB memahami sepenuhnya bahwa NU sebagai sebuah jamiyyah, memiliki landasan pandangan dan sikap politik bahwa setiap warga jamiyyah NU yang menjadi anggota dan aktifis partai harus turut memperjuangkan landasan, pandangan dan sikap politik tersebut dalam keseluruhan gerak dan langkah partai.
- c.) Kyai sebagai seorang figur pemimpin pusat partai politik.

Kyai dianggap sebagai patron bagi para pengikutnya yaitu sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual.

Alasan yang menopang keadaan ini yaitu:

- 1) Kyai secara tradisional adalah elite yang berpengaruh dalam umat Islam.
- 2) Kyai adalah elite politik yang mempunyai pengaruh kuat terhadap sikap politik umat Islam. Karena ada beberapa kyai

memegang kepemimpinan politik pada tingkat propinsi dan nasional, maka perubahan-perubahan yang dibawa melalui kepemimpinan mereka juga bersifat nasional. Dengan kata lain perubahan yang terjadi pada tingkat lokal seringkali merupakan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih luas.

Pada pemilu 2004 mayoritas masyarakat kecamatan Wangon memilih Megawati dan Hasyim Muzadi sebagai presiden dan wakil presiden. Hasyim Muzadi adalah mantan ketua PBNU dan dia adalah seorang kyai sehingga sebagian masyarakat kecamatan Wangon memilihnya. Kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden ini di kecamatan wangon karena Megawati juga memiliki massa yang banyak di kecamatan Wangon.

d.) Memilih pemimpin yang pendukungnya banyak.

Dengan kehidupan yang masih cukup tradisional dan minimnya pendidikan yang di peroleh. Maka pola pikir masyarakat Wangon masih cukup sederhana. Seringkali sikap mereka terhadap masalah-masalah politik sangat apatis, masa bodoh dan acuh tak acuh. Keadaan seperti ini menurut beberapa ahli termasuk budaya politik parokial yaitu budaya politik yang masih sederhana dimana belum ada spesialisasi kekuasaan. Sehingga menurut penulis pendidikan politik masyarakat di kecamatan wangon harus terus ditingkatkan.

Dari alasan-alasan di atas dan dengan melihat hasil pemilihan umum (pemilu) 2004 setiap desa di kecamatan Wangon maka menurut

penulis pengaruh kyai dalam preferensi politik masyarakat dalam pemilu dapat terlihat jelas di beberapa desa saja. Yaitu di desa tempat kyai bertempat tinggal dan beraktifitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan kyai di kecamatan Wangon sebenarnya dalam posisi mendua yaitu sebagai tokoh politik dan sebagai tokoh agama. Sebagai tokoh agama kyai memberi pengajaran bagi masyarakat yaitu melalui pesantren dan madrasah. Dalam bidang politik kyai seringkali di ajak oleh tokoh-tokoh politik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecamatan Wangon untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam partai. Karena menurut tokoh politik dengan melibatkan kyai dalam partai maka pengikut dari kyai tersebut akan memilih partai tersebut. Aktifitas kyai dalam partai terlihat saat kyai mengikuti kampanye pada waktu pemilu, mengadakan ceramah-ceramah keagamaan pada waktu menjelang pemilu, memberikan anjuran pada masyarakat untuk mengikuti kampanye, dan mengikuti rapat partai yang diadakan untuk persiapan menghadapi pemilu.
2. Posisi kyai yang strategis mendorong kyai untuk harus berhubungan dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik. Interaksi antara kyai dengan pemerintah terlihat ketika pemerintah mengadakan suatu acara tertentu maka kyai menjadi tamu undangan dalam acara tersebut. Sebaliknya pemerintah setempat akan mendapat undangan dari kyai ketika kyai mengadakan acara. Kiprah kyai dalam pendidikan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Program-

program yang diadakan pemerintah akan berjalan jika didukung oleh kyai seperti pembayaran pajak, penggalangan dana untuk korban bencana alam dan prom-program lain.

Interaksi antara kyai dengan tokoh-tokoh politik terlihat ketika para tokoh politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta dukungan dari para kyai. Menurut tokoh tersebut jika melibatkan kyai maka acara akan lebih di dukung masyarakat.

Dalam interaksi antara kyai dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik, kyai merupakan jembatan untuk menyampaikan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan tokoh-tokoh politik.

3. Peran kyai dalam bidang politik sangat mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu. Meskipun tidak semua masyarakat mengikutinya. Masyarakat yang mengikuti partai pilihan kyai biasanya masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan kyai dan sering mengikuti berbagai kegiatan bersama kyai. Dan biasanya masyarakat yang tidak mengikuti partai kyai adalah masyarakat yang mengaku dirinya Islam tetapi pengetahuan agamanya kurang dan biasanya tidak terlalu akrab dengan kyai. Dengan melihat hasil pemilu 2004 pengaruh kyai yang paling menonjol adalah di desa Klapagading dan Banteran, desa ini merupakan pusat kegiatan dimana kyai bertempat tinggal dan melakukan kegiatannya. Menyusul kemudian windunegara, klapagading kulon,

jambu, randegan, jurang bahas, pengadegan, rawaheng, wangon, cikakak, dan wlahar.

B. Saran

- 1.) Bagi pemerintah setempat hendaknya dapat lebih meningkatkan pendidikan politik masyarakat kecamatan Wangon.
- 2.) Bagi Tokoh-tokoh politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kecamatan Wangon hendaknya dapat melakukan kegiatannya dengan sehat.
- 3.) Bagi kyai hendaknya lebih meningkatkan perannya sebagai tokoh agama dalam masyarakat.
- 4.) Bagi masyarakat dalam memilih partai seharusnya memperhatikan visi dan misi partai yang dipilihnya.

Lampiran 1

Responden dan Informan

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1.	Jawawi	63 tahun	kyai	MAN,ponpes	Windunegara
2.	Hamam	60 tahun	kyai	MAN,ponpes	Windunegara
3	Maksum	53 tahun	kyai	SMP,ponpes	Klapagading
4.	Sobirin	38 tahun	wiraswasta	PT	Banteran
5.	Juanda	32 tahun	wiraswasta	PT	Wangon
6.	Sudarti	35 tahun	wiraswasta	PT	Klapagading
7.	Rifatul A.	30 tahun	wiraswasta	PT	Wangon
8.	Siti Asiah	40 tahun	Petani	SMP	Klapagading
9.	Sudarti	35 tahun	GTT	PT	Klpagading
10.	Nasum	55 tahun	buruh	SD	Klpagading
11.	Cahyono	25 tahun	buruh	SMU	Klapagading
12.	Budi N.H.	23 tahun	GTT	PT	Klapagading
13.	Agus Y.U	26 tahun	karyawan	PT	Klapagading
14	Kamil M	40 tahun	wiraswasta	SMP	Klapagading
15.	Timah	48 tahun	pedagang	SMP	Wangon
16	Sugiyati	28 tahun	pedagang	SMU	Randegan
17.	Retno S.	26 tahun	pedagang	SMU	Wangon
18.	Nasih	45 tahun	pedagang	SD	Wangon
19	Yanto	28 tahun	Pedagang	SD	Wangon
20.	Sri Wahyuni	48 tahun	pedagang	SMP	Klapagading
21.	Sophan	40 tahun	pedagang	SMP	Klpagading
22.	Aris Pamuji	26 tahun	Karyawan	PT	Wangon
23.	Bahrn S.	45 tahun	Wiraswasta	PT	Klapagading
24.	Siti Wahyu	32 tahun	Ibu rumah tangga	SD	Klpagading
25.	Ngatini	60 tahun	pedagang	SR	Klpagading
26.	Rejo Utomo	73 tahun	Pedagang	SR	Klpagading
27.	Darsini	27 tahun	Ibu rumah tangga	SMU	Klpagading
28	Rusriyanto	28 tahun	karyawan	SD	Klpagading
29.	Jumadi	39 tahun	PNS	SMP	Klpagading
30.	Ratini	36 tahun	Ibu rumah tangga	SD	Klpagading
31.	Komariyah	41 tahun	Ibu rumah tangga	SD	Klpagading
32.	Purwanto	25 tahun	Ibu rumah tangga	SMP	Klpagading
33.	Haryanto	21 tahun	karyawan	STM	Klpagading
34.	Dani	19 tahun	karyawan	SMU	Klpagading
35.	Warsini	52 tahun	pedagang	SD	Klpagading
36.	Aji Rusdianto	18 tahun	pelajar	SMU	Klpagading
37.	Jurini	50 tahun	pedagang	SD	Klpagading
38.	Asrofi	43 tahun	buruh	SD	Klpagading
39.	Suryanungsih	39 tahun	Ibu rumah tangga	SD	Klpagading
40	Asih Sukesih	31 tahun	Ibu rumah tangga	SMU	Klpagading

